1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Kabupaten HST pada Triwulan III 2026 mengalami tren deflasi pada Juli-Agustus dan kembali inflasi pada September, namun secara tahunan (y-on-y) masih di atas target nasional.

   - Juli 2026: Deflasi m-to-m -0,68%, inflasi y-on-y 4,30%, inflasi y-to-d 1,24%. Pendorong deflasi: Ikan Gabus andil -0,43%, Ikan Papuyu -0,25%, Bawang Merah -0,16%. Pendorong inflasi: Daging Ayam Ras 0,23%, Terong 0,10%. Secara y-on-y penyumbang terbesar Beras 0,95%, Ikan Papuyu 0,57%, Emas Perhiasan 0,51%.
   - Agustus 2026: Deflasi m-to-m -0,53%, inflasi y-on-y 3,85%, inflasi y-to-d 0,70%. Pendorong deflasi: Ikan Papuyu -0,30%, Ikan Gabus -0,21%. Pendorong inflasi: Daging Ayam Ras 0,13%, Ketimun 0,06%. Secara y-on-y Beras 0,59%, SKM 0,53%, Emas Perhiasan 0,47%.
   - September 2026: Inflasi m-to-m 0,49%, inflasi y-on-y 3,71%, inflasi y-to-d 1,20%. Pendorong inflasi: Ikan Nila 0,13%, Kacang Panjang 0,11%, Jagung Manis 0,10%. Pendorong deflasi: Ikan Papuyu -0,18%. Secara y-on-y Beras tetap tertinggi 0,72%, Emas Perhiasan 0,36%, Terong 0,27%.

   Kelompok pengeluaran (Makanan, Minuman dan Tembakau) konsisten menjadi pendorong utama inflasi tahunan (Juli 7,21% andil 2,90%; Agustus 5,76% andil 2,34%; September 5,64% andil 2,30%). Perumahan, Air, Listrik, BBM Rumah Tangga menjadi pendorong y-to-d September 3,24%.

   Risiko ke depan: Risiko kenaikan harga pada HBKN Maulid Nabi Muhammad SAW, volatilitas komoditas perikanan darat (ikan gabus, papuyu, sepat siam), cabai rawit dan bawang merah, serta kenaikan harga beras siam dan BBM yang berpotensi mengerek inflasi Triwulan IV. Posisi HST dibanding Provinsi: Juli inflasi HST 4,30% di atas provinsi 4,28%, Agustus 3,85% di bawah provinsi 4,69%, September 3,71% di bawah provinsi 4,86%.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   a. **Keterjangkauan Harga**: Harga beras (penyumbang inflasi y-on-y tertinggi 0,59-0,95%) dan minyak goreng masih di atas HET di pasar tradisional menjelang HBKN.

   b. **Ketersediaan Pasokan**: Fluktuasi pasokan ikan air tawar lokal (gabus, papuyu) dan hortikultura (cabai rawit, bawang merah, tomat) menyebabkan deflasi tajam saat panen dan inflasi saat paceklik. Belum adanya neraca pangan yang terukur.

   c. **Kelancaran Distribusi:** Distribusi BBM Subsidi Bio Solar dan Pertalite di SPBU belum optimal, perlu monitoring rutin bersama SKPD terkait. Distribusi beras SPHP dan Minyakita via Kios Mitra Bulog masih perlu uji petik MGR.

   d. **Komunikasi Efektif:** Early Warning System (EWS) pengendalian inflasi belum berjalan optimal dan data gaya hidup untuk pemutakhiran diagram timbang IHK belum tersedia.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Selama periode 01 Juli s.d 30 September 2026 telah dilaksanakan 30 kegiatan, antara lain:

   a. **Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Murah.**

      Tujuannya untuk menjaga keterjangkauan harga dan melindungi daya beli masyarakat agar dampak kenaikan inflasi tidak meluas. Komoditas yang diintervensi meliputi Beras Siam Bupati HST bersubsidi, Beras SPHP Bulog, Minyak Goreng Minyakita, dan komoditas hortikultura. Output yang dihasilkan adalah tersalurkannya bahan pokok dengan harga di bawah harga umum, seperti minyak goreng 1 liter dijual Rp22.000 (lebih murah Rp3.000 dari harga umum Rp25.000) dan beras bersubsidi. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 14 kali, antara lain GPM di Halaman Kantor Kecamatan Limpasu (16 Juli), Operasi Pasar Murah Beras Siam di Pasar Keramat Barabai (17 Agustus) menggunakan BTT, Pasar Murah menjelang Maulid Nabi di 8 desa (Kalibaru, Panggung, Alat, Kayu Rabah, Tapuk, Lunjuk, Banua Kepayang, Mantaas, Awang Baru) pada 10-26 Agustus, dan Pasar Murah HAORNAS (13 September). Sasaran 250 KK prioritas Desil 1-2 per kegiatan. Hasilnya kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dan beban ekonomi dari dampak inflasi dapat diringankan.

   b. **Kebijakan Monitoring dan Pengawasan Distribusi Energi dan Pangan.**

      Tujuannya untuk memastikan kelancaran distribusi dan tepat sasaran agar tidak terjadi kelangkaan. Komoditas BBM Bio Solar, Pertalite dan Minyakita. Output berupa laporan monitoring di SPBU bersama SKPD terkait pada tanggal 03, 07, 13, 14 Juli dan 18, 19 September 2026, serta uji petik MGR Minyakita ke Kios/Toko Mitra Bulog pada 11 Juni dan 23-24 Agustus 2026 dan monitoring penyaluran Beras Siam bersubsidi 19-20 Agustus. Hasilnya penyaluran berjalan tertib, lancar dan tepat sasaran.

   c. **Kebijakan Penguatan Koordinasi dan Program Unggulan GEMPIDA INRAPA.**Tujuannya untuk pendalaman strategi dan penguatan koordinasi lintas bidang TPID dalam upaya menstabilkan harga komoditas pangan pokok lainnya. Komoditas pangan dan holtikultura (cabai, tomat, terong, daun bawang, toga, dan bawang merah). Output berupa **Rakor TPID 25 Juni** tentang kerjasama antar daerah dan Review GEMPIDA, **Rakor lanjutan 16 Juli** tentang progres EWS dan laporan koordinator 4 Bidang, **Rakor 12 Agustus** penanganan dampak kenaikan BBM dan antisipasi HBKN Maulid, **Rakor TPID 22 September** terkait tindak lanjut arahan Sekjen Kemendagri dalam rangka pendalaman strategis dan langkah konkrit pengendalian inflasi yang langsung dipimpin Sekretaris Daerah serta **Monitoring dan Evaluasi GEMPIDA INRAPA** pada 4 SKPD (Dinas Pertanian, Diskominfo SP, Dinas Perdagangan, Dinas LH) pada 15 September 2026 yang dinilai keragaman komoditas, kondisi fisik, inovasi tepat guna, dan dampak terhadap pengendalian inflasi. Hasilnya seluruh tanaman ditanam dengan memanfaatkan pekarangan kantor, ada yang polybag dan langsung di tanah, cukup berpengaruh terhadap andil inflasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Evaluasi menunjukkan kebijakan Pasar Murah dan GPM efektif menekan gejolak harga

hortikultura dan ikan pada Juli-Agustus sehingga terjadi deflasi m-to-m, namun belum mampu menahan inflasi y-on-y beras yang masih menjadi penyumbang tertinggi (0,72% pada September). Kebijakan monitoring BBM dan Minyakita berjalan tertib dan lancar sesuai hasil rapat evaluasi 29 Juli, namun masih bersifat insidentil dan belum menjadi EWS permanen. Kebijakan GEMPIDA INRAPA menunjukkan antusiasme tinggi dari SKPD dengan hasil cukup baik (komoditas cabai, tomat, terong, bawang), tetapi belum terintegrasi dengan neraca pangan daerah dan belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan inflasi tahunan yang masih di kisaran 3,71-4,30%. Sinergi TPID dengan Bulog Banjarbaru untuk beras lokal sudah berjalan namun intervensi subsidi distribusi menggunakan BTT baru akan direalisasikan Oktober 2026.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    1. Melaksanakan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah bersubsidi BTT secara terfokus di 11 kecamatan rawan inflasi menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru dengan komoditas Beras Siam, Minyakita, dan cabai rawit, target 500 KK per kecamatan dengan harga beras Rp10.500/kg (di bawah HET Rp11.500) dan minyak Rp14.000/liter. Menggunakan stok Bulog Cabang HST dan Kios Mitra serta anggaran BTT Bidang Kelancaran Distribusi yang telah disepakati Oktober 2026 untuk menekan andil inflasi beras yang menjadi penyumbang utama y-on-y 0,72%, dilaksanakan pada Triwulan IV (November-Desember 2026).
    2. Memperkuat Early Warning System dan Neraca Pangan Daerah dengan melakukan survei gaya hidup dan updating data IHK bersama BPS HST. Terbangunnya dashboard EWS dan neraca pangan komoditas beras, ikan, bawang merah, cabai yang diupdate mingguan. Berkolaborasi dengan BPS, DKPP, Disdag dan Diskominfo SP, untuk mengatasi permasalahan belum adanya data terukur sebagai dasar intervensi. Penyelesaian dashboard pada akhir Oktober 2026 dan evaluasi bulanan.
    3. Melanjutkan dan memperluas program GEMPIDA INRAPA ke seluruh SOPD dan instansi vertikal dengan penanaman komoditas inflasi (bawang merah polybag, cabai, tomat), minimal 75% SKPD aktif menanam dan melaporkan produktivitas. Melihat antusias dan hasil cukup baik dari 4 SKPD yang telah dimonitoring, untuk mendukung ketersediaan pasokan dan menstabilkan harga hortikultura. Monitoring lanjutan dilaksanakan November 2026 menyesuaikan agenda pimpinan.
    4. Intensifikasi monitoring penyaluran BBM Subsidi dan Minyakita melalui tim terpadu TPID 2 kali seminggu di 10 SPBU dan 20 Kios Mitra Bulog dengan dukungan Disdag, Satgas, dan Polres HST untuk menjamin kelancaran distribusi dan tepat sasaran secara berkelanjutan di Triwulan IV 2026.